

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi telah membawa beberapa perubahan dalam ketatanegaraan salah satunya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam hal otonomi daerah sehingga suatu daerah dapat menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri(Hakim, 2016:112). Sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap daerah-daerah yang tertinggal karena dapat mandiri dan memajukan pembangunan nasional serta meningkatkan perkenomian nasional. Akibatnya akan memberikan pengaruh pada regulasi sistem keuangan pemerintahan di daerah.

Pemerintah daerah (Pemda) merupakan pihak yang menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan (Trisnaningsih & Fitri R., 2022). Pemda tersebut memiliki lingkup kekuasaan administrative yang lebih terbatas di suatu negara, yang mana di negara Indonesia ini dibagi menjadi beberapa wilayah-wilayah provinsi dan dari daerah-daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi wilayah kota serta kabupaten. Pengelolaan keuangan daerah terdapat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target anggaran (Hakim, 2016:114). Transparansi dan akuntabilitas pada era reformasi ini semakin

meningkat dalam hal mengelola keuangan daerah, sehingga laporan pertanggungjawaban wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, yaitu laporan realisasi anggaran menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku (Darise, 2018).

Adanya otonomi daerah juga menuntut pemerintahan daerah agar lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan optimal berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, keseimbangan antara hak dan kewajiban demi tercapainya *Good governance*. Evaluasi dalam pengeluaran kas menjadi salah satu hal yang penting dalam tercapainya *Good Governance* tersebut. Oleh karena itu, aspek pengeluaran kas menjadi pokok bahasan utama dalam pengelolaan anggarannya. Karena pada pengeluaran kas memuat transaksi pengeluaran yang sering terjadi misalnya adanya pembelian tunai, pembayaran maupun hasil transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya kas.

Sesuai amanat yang tertuang dalam paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya, keseriusan jajaran pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah. Tentunya tujuan pembentukan paket perundang-undangan tersebut agar setiap lembaga pemerintah mampu mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Lapopran Keuangan Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset bisa didapat melalui pembelian, transfer masuk, barang hasil sitaan, dan hibah.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan pondasi yang kokoh, dimana setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi (lingkungan pengendalian) yang mendorong perilaku positif dalam manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong seluruh pengelola aset negara untuk memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung

strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia, serta peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi

Penyelewengan dan Penyimpangan kas dapat dihindari dengan adanya suatu sistem pengeluaran kas yang baik, dengan adanya sistem informasi yang memuaskan, maka hal-hal yang merugikan dapat dihindari dan diminimalisasi. Sebab itu organisasi harus dapat merancang dan membuat suatu sistem dan prosedur akuntansi terhadap kas yang dapat mengurangi bahkan meniadakan resiko penggelapan dan penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengeluaran Kas juga merupakan komponen sumber daya yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya agar dapat tercapai target dan tujuan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Cikal bakal SPIP ini dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 30 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/4/2004. Unsur-unsur Pengawasan Melekat adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, dan review intern. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian intern yang telah

ada sebelumnya melalui penerbitan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adaptasi dari COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*)-*Internal Control Integrated Framework*. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Oleh karena itu, berdasar kan PP No. 60 Tahun 2008 untuk lebih meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, khususnya dalam pengeluaran kas perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya sistem pengendalian internal bertujuan untuk menghindari segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan, serta pemborosan harta kekayaan negara terhadap kas dan guna memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan yang terjadi dan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal tersebut.

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya agar dapat tercapai target dan tujuan suatu pembangunan. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah, penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang

memadai, dan memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan Pemerintah. Sehingga jika tidak terlaksana pengendalian internal dengan baik maka akan mudah terjadi penggelapan kas(Mulyadi, 2016:432).

Adapun tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat tercapai jika diimplementasikan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut PP No.60 Tahun 2008, meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan Komunikasi juga pemantauan. Kegiatan Pengendalian dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui bahwa kegiatan pengendalian tersebut apakah masih efektif atau tidak untuk dilaksanakan dan juga untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau menindak lanjuti atas temuan-temuan yang telah diperoleh, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan atas fungsi-fungsi yang terkait. Hal ini juga dimaksudkan khususnya bagian bendahara dapat melakukan proses pencatatan transaksi pengeluaran kas dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal penyampaian informasi, baik dalam hal memasukkan data, pencairan data, pembuatan laporan. Namun, masih ada saja beberapa kendala yang ditemui dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas yaitu seperti belum adanya bagian khusus yang dibentuk untuk melakukan pengendalian internal. Dalam pengeluaran kas juga masih sering ditemukan masalah seperti human error seperti salah memasukan data/kesalahan interpretasi angka, kendala jaringan pada saat akan mengupload laporan di SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang merupakan situs resmi BPKP. Maka dari itu,

perlu dilakukan Evaluasi setiap saat manakala hasil analisa resiko terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan masih ditemukan potensi masalah yang akan timbul. Evaluasi terhadap pengendalian dapat juga dilakukan setelah adanya review capaian kerja tentunya disertai dengan analisis terhadap masalah yang menyebabkan capaian kinerja tidak maksimal. Jika masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam capaian kinerja maka kegiatan pengendalian tersebut harus direvisi, diperbaiki untuk menangani masalah sejenis agar tidak kembali.

Berdasarkan hal tersebut tentunya dapat memberikan gambaran yang semakin jelas, bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas tidak bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu tentunya harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tidak terkecuali pimpinan maupun staf/pegawai, pimpinan tertinggi atau *top management*. Semua bersatu padu membentuk konfigurasi yang terpolakan dalam satu kesatuan, dimana yang satu tidak merasa lebih penting dari yang lain, dan yang lain tidak boleh merasa dilangkahi atau melangkahi yang lain, dengan tekad yang sama yaitu mencapai tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun, ini bukan hanya berarti hanya sekedar mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, tetapi yang menjadi perhatian lebih yaitu proses pencapaian tujuan harus diiringi dengan sumber daya yang efektif dan efisien, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, melalui laporan keuangan yang handal dan kekayaan milik negara yang terjaga dengan baik dan aman dalam koridor yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Setiap kegiatan, setiap kebijakan dan setiap tindakan yang akan dilakukan harus dapat dipahami oleh semua unsur/palaku yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Penggunaan kas sering dimanipulasi dan disalahgunakan oleh orang ataupun sekelompok yang tidak bertanggungjawab atas penggunaan kas tersebut, terutama dalam pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan salah satu komponen sumber daya yang krusial di dalam menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah. Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang mana sering dilakukan untuk transaksi pembayaran. Termasuk pengeluaran kas adalah pembayaran kepada pihak lain dengan penyerahan uang tunai, penyerahan cek, transfer kas antar bank termasuk transfer melalui fasilitas ATM.

Pengendalian Internal yang baik dapat diciptakan dengan peran Pemerintah dalam menetapkan pertanggungjawaban secara jelas dan masing-masing orang memiliki tanggung jawab untuk tugas dan kewajiban yang diberikan padanya. Apabila tanggung jawab diberikan secara tidak jelas dan suatu saat terjadi kesalahan, maka terdapat kesulitan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Untuk itu diperlukannya pengawasan terhadap pengendalian internal dengan baik dengan cara membuat prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas. Antara lembaga yang satu dengan yang lainnya dapat mempunyai prosedur-prosedur pengeluaran kas yang berbeda (Mulyadi, 2016:433).

Sistem pengendalian internal pengeluaran kas harus terintegrasi dalam

bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi mulai dari pimpinan tertinggi sampai staf / pegawai. Penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada akhirnya menjadi salah satu agenda penting bagi setiap instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah juga diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang berlaku sehingga manajemen mempunyai rancangan pengendalian yang terarah yang mampu mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Aktifitas dalam pemerintah tidak dapat tercapai sesuai dengan rencana tanpa adanya pengeluaran kas yang baik. Sehingga penting adanya suatu perencanaan dan pengawasan supaya dana yang dikeluarkan tepat pada sasaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Mulyadi, 2016:434).

Tercapainya pembangunan di suatu daerah tergantung dari pengendalian yang dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Jika pengendalian tidak dilaksanakan maupun yang sedang dalam penyelesaian serta yang masih dalam tahap perencanaan akan menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas, hal ini bisa terjadi karena lemahnya pengendalian. Penggunaan dana yang tidak efektif dan efisien akan berpengaruh, hal tersebut bisa menghambat proses pembangunan.

Keadaan seperti itu dapat terjadi karena pengendalian tidak terkontrol dengan baik, seperti penyelewengan kas untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan berbagai pihak yang mempunyai maksud untuk penggelapan uang dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut lembaga pemerintah harus membentuk struktur pengendalian internal dalam pengeluaran

kas yang efektif. Menurut PP. No. 60 Tahun 2008 adapun tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat tercapai jika diimplementasikan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi, agar tidak tergantung satu orang
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

2. Penilaian Risiko

3. Kegiatan Pengendalian

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
- b) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- c) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- d) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola dan menggunakan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu penggunaan anggaran yang penting adalah pengeluaran kas, yang melibatkan sejumlah besar uang dalam transaksi harian pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pengeluaran kas, guna memastikan bahwa pengeluaran tersebut tepat sasaran, legal, dan tidak merugikan negara.

Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 3 juta jiwa. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Pemerintahan Kota Surabaya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik termasuk layanan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran kas untuk keperluan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki banyak kebutuhan dan tuntutan dari masyarakatnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengelola anggaran negara yang digunakan untuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat ini meliputi berbagai macam kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dengan pengeluaran kas yang besar, risiko kecurangan, kehilangan aset, atau kesalahan akuntansi dapat terjadi. Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah Kota Surabaya perlu memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam pengeluaran kas. Evaluasi sistem pengendalian internal dapat membantu pemerintah dalam mengetahui kelemahan atau kekuatan sistem pengendalian internal yang ada dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian.

Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Surabaya akan membantu mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal yang telah dibangun sudah cukup kuat untuk mengelola risiko yang mungkin timbul. Evaluasi ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi apakah pengeluaran kas telah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta menjamin akuntabilitas yang tepat dalam pengeluaran kas.

Dalam evaluasi sistem pengendalian internal ini, berbagai aspek dapat dievaluasi seperti kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang ada, pemisahan tugas dan tanggung jawab, pengawasan dan pemantauan, dan pelaporan keuangan. Evaluasi ini juga dapat melihat apakah sistem pengendalian internal telah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan evaluasi sistem pengendalian internal yang baik, Pemerintahan Kota Surabaya dapat memastikan bahwa pengeluaran kas pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah dan memastikan keberlangsungan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Surabaya.

Meskipun sistem pengendalian internal dalam pengeluaran kas sudah ada di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal ini dapat memberikan informasi penting tentang keefektifan dan efisiensi pengeluaran kas di Kota Surabaya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem pengendalian internal yang lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang sedang menjadi fokus Pemerintah saat ini yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di Kota Surabaya merupakan unit pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang pembangunan, pengeluaran kas merupakan aspek yang penting dalam menjalankan program pembangunan tersebut dan pelaksanaannya diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau penggelapan dana.

Permasalahan yang terjadi pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya berkaitan dalam hal merekrut pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang tertentu di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya masih ada yang belum dari jurusan sesuai bidangnya, contohnya bagian akuntansi bukan dari akuntansi melainkan ekonomi dan manajemen serta adanya perangkapan tugas bagian keuangan dan akuntansi. Disamping itu belum maksimalnya dan meratanya kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, ataupun pengadaan diklat atau bagi pegawai yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pengeluaran kas sehingga kurangnya pemahaman pegawai dibagian keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas serta terlambatnya dalam pembuatan laporan keuangan tahunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneruskan penelitian terdahulu dan Penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kota Surabaya apakah telah berjalan dengan efektif atau belum karena telah adanya kasus yang terjadi berulang-ulang dalam Kedinasan tersebut. Alasan peneliti mengambil studi kualitatif di Kota Surabaya adalah Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki banyak potensi untuk menjadi lokasi penelitian kualitatif yang kaya. Ketersediaan data dan aksesibilitas yang baik dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian terkait sistem Pengendalian internal telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan

pada metode penelitian dan objek yang diteliti.

Dalam konteks ini, skripsi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dalam pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem tersebut. Diharapkan hasil evaluasi dan rekomendasi ini dapat membantu Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran kas, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu masih adanya perangkapan tugas pada fungsi pengeluaran kas. Hal ini merupakan kelemahan instansi yang tidak memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern dalam pengelolaan kas. Dengan adanya permasalahan yang sering dihadapi oleh instansi-instansi seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan pengeluaran kas. Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu lebih dalam permasalahan tersebut dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengeluaran Kas Pada Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern terhadap fungsi pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya?
2. Bagaimana kesesuaian dari unsur-unsur sistem Pengendalian intern COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*)-*Internal Control Integrated Framework* terhadap pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern atas fungsi pengeluaran kas yang diterapkan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya telah memenuhi syarat sistem pengendalian intern dan sudah dapat dikatakan efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Intansi

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai masukan untuk memecahkan masalah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sistem Pengendalian intern dalam pengeluaran kas.

2. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai wawasan serta ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan penerapan dari ilmu ekonomi khususnya akuntansi sektor publik yang telah didapat dari proses belajar peneliti sehingga menambah wawasan penulis dalam menangani berbagai penerapan teori dengan praktik yang sebenarnya dan untuk menambah pengetahuan tentang studi penelitian dan dapat mengembangkan ilmu Akuntansi khususnya perihal pengendalian intern organisasi.

